

Judul : Antisipasi banjir Pulau Jawa, DPR: modifikasi cuaca solusi jangka pendek
Tanggal : Jumat, 30 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Antisipasi Banjir Pulau Jawa

DPR: Modifikasi Cuaca Solusi Jangka Pendek

Senayan menyoroti modifikasi cuaca yang dilakukan Pemerintah untuk menekan risiko banjir dan longsor di Pulau Jawa. Upaya tersebut penting dalam kondisi darurat, tapi tidak dapat dijadikan satu-satunya andalan dalam penanggulangan bencana dalam jangka panjang.

ANGGOTA Komisi XII DPR Dipo Nusantara mengatakan, modifikasi cuaca hanya menunda atau mengurangi curah hujan sesaat. "Kalau persoalan hulunya tidak dibenahi, banjir dan longsor akan terus berulang," ucapnya, kemarin.

Menurut Dipo, modifikasi cuaca seperti penyemaian awan memang dapat membantu mengurangi intensitas hujan dalam waktu tertentu. Namun, langkah ini tidak menyentuh akar persoalan yang menyebabkan banjir dan longsor berulang. Seperti kerusakan lingkungan, buruknya tata kelola daerah aliran sungai (DAS), hingga lemahnya sistem mitigasi bencana.

Mayoritas pemicu banjir dan longsor akhir-akhir ini karena kerusakan lingkungan dan buruknya tata kelola DAS. "Harusnya faktor-faktor itu yang dikelola secara intensif dari waktu ke waktu," tandas politikus PKB ini.

Pemerintah, lanjutnya, mesti

memiliki rencana jangka panjang dan berkelanjutan dalam menghadapi potensi bencana. Terlebih, Indonesia merupakan negara yang secara geografis sangat rawan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan.

Dipo menambahkan, modifikasi cuaca harus diiringi dengan pembenahan struktural. Seperti normalisasi sungai, perbaikan sistem drainase, rehabilitasi daerah resapan air, serta penataan tata ruang yang tegas dan berkelanjutan.

"Tanpa normalisasi sungai, perbaikan drainase, perlindungan kawasan hutan dan resapan, modifikasi cuaca tidak akan maksimal, hanya menjadi solusi sesaat," jelasnya.

Dengan itu, Dipo mendorong Pemerintah untuk memperkuat mitigasi bencana sebagai langkah utama pencegahan. Mitigasi mencakup upaya mengurangi risiko bencana sejak sebelum bencana terjadi dan bukan sekadar



Dipo Nusantara

penanganan saat kondisi darurat.

Ia berharap, Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat bersinergi dalam menyusun strategi penanggulangan bencana yang komprehensif, sehingga kejadian banjir dan longsor tidak terus berulang setiap musim hujan.

Sementara, anggota Komisi V DPR Teguh Iswara Suardi meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat sistem peringatan dini dan meningkatkan literasi kebencanaan. Tujuannya agar masyarakat lebih siap menghadapi potensi cuaca ekstrem dan bencana alam yang

kian meningkat.

Menurutnya, mitigasi bencana harus diperkuat melalui penyebaran informasi yang masif dan mudah diakses publik. Sehingga mendorong adanya amplifikasi (perluasan) informasi cuaca kepada masyarakat melalui berbagai kanal media. "Perlu dilakukan upaya lebih seperti SMS blast dan WA blast," ujarnya, kemarin.

Selain itu, perlu kolaborasi dengan berbagai *stakeholder* yang ada agar masyarakat mudah memperoleh informasi terkait perubahan cuaca. "Kalau perlu bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi populer," saran politikus Nasdem ini.

Kanal di media sosial (medsos), tambah Teguh, bisa menjadi saluran amplifikasi edukasi kebencanaan. BMKG bisa bekerja sama dengan influencer untuk meningkatkan awareness atau kesadaran masyarakat.

Selain itu, ia menekankan pentingnya integrasi informasi cuaca dengan layanan publik, terutama pada momentum pergerakan masyarakat. Seperti mudik Lebaran agar masyarakat dapat mengambil keputusan perjalanan secara lebih aman

dan terukur.

Bagaimana tanggapan BMKG? Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto mengatakan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dijalankan sebagai respons paralel atas menu runnya daya dukung lingkungan dan meningkatnya risiko cuaca ekstrem. Utamanya hujan lebat yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi.

"Cold pool merupakan fenomena meteorologi yang sepenuhnya alami dan selalu terbentuk setiap kali terjadi hujan, baik secara alami maupun melalui OMC," ujar Tri dalam keterangannya, Kamis (29/1/2026).

Diketahui, beredarnya narasi di media sosial yang menyebut OMC berisiko menjadi bom waktu, karena dianggap dapat membuat cuaca tidak stabil, memicu fenomena kolam dingin (*cold pool*) sehingga memindahkan hujan ke wilayah lain. Akibatnya, bisa menimbulkan rasa aman palsu bagi masyarakat.

Tri melanjutkan, fenomena cold pool terjadi akibat pengumpulan air hujan di bawah awan badai yang mendinginkan udara dan menciptakan massa udara padat yang turun ke permukaan. ■ TIF